

Strategi Pengembangan Program Pemberdayaan Masyarakat Hutan

Kemasyarakatan di Desa Gunung Silanu Kecamatan Bangkala

Kabupaten Jeneponto

Nurhikmah¹, Asar Said Mahbub², Supratman Supratman²

¹Program Studi Ilmu Kehutanan Sekolah Pascasarjana Universitas Hasanuddin, Makassar

²Laboratorium Kebijakan dan Kewirausahaan, Fakultas Kehutanan Universitas Hasanuddin, Makassar

*E-mail: nurh8884@gmail.com

ABSTRACT: *Community forestry development in Gunung Silanu village is capable of rebuilding deforestation-affected forest, but communities can not take advantage of the potential forests to improve their welfare. Therefore, a strategy for community forestry development is required. This study aims to analyze the success rate of community empowerment programs in community forest management, analyze the drivers and restraints of community forest management, and formulate strategies and action programs for community empowerment development. The study was conducted from February to May 2018 in the community forest area of Gunung Silanu Village. The data obtained were identified and reviewed using the criteria tables and indicators of community empowerment. Furthermore drivers and inhibitors were identified to determine the importance of each factor through expert studies. Finally, strategies and action programs were formulated for each factor. The results show that the empowerment of community forestry development in Gunung Silanu village succeeded with a score of 2.4. Nevertheless, there are several factors that hinder the management of community forest. Therefore, the inhibiting factors will be reduced and simultaneously the driving forces will be strengthened through strategies and action programs.*

Keywords: *Community empowerment, community forest, development strategy*

DOI: <http://dx.doi.org/10.24259/jhm.v10i2.4765>

1. PENDAHULUAN

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.83/Menlhk/Setjen/Kum.II/10/2016 tentang perhutanan sosial menjelaskan bahwa hutan kemasyarakatan (HKm) adalah hutan negara yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat setempat. Pada tahun 1998-1999 Departemen Kehutanan melalui Balai Rehabilitasi Lahan dan Konservasi Tanah (BRLKT) Jeneberang-Walanae melaksanakan *Pilot Project* pembangunan hutan kemasyarakatan seluas ± 2.500 ha pada tiga kabupaten di Sulawesi Selatan, yaitu Kabupaten Jeneponto seluas 1.000 ha, Kabupaten Sidrap seluas 1.000 ha, dan Kabupaten Maros seluas 500 ha. Salah satu desa di Kabupaten Jeneponto yang mendapatkan kepercayaan mengelola HKm adalah Desa Gunung Silanu. Hal ini ditandai dengan terbitnya SK.IUP HKm Jeneponto terhadap kelompok HKm Gunung Silanu seluas 980 ha.

Studi pendahuluan menunjukkan bahwa beberapa kriteria pemberdayaan masyarakat pengelolaan hutan kemasyarakatan menunjukkan hasil yang belum memadai. Beberapa anggota masyarakat sebenarnya masih aktif berpartisipasi, tetapi hal itu belum dianggap cukup dibandingkan jika semua anggota kelompok tadi ikut berpartisipasi. Hal ini didukung oleh penelitian Baso (2016) yang menunjukkan bahwa telah terjadi penurunan tingkat partisipasi petani hutan kemasyarakatan. Beberapa kelompok tadi sudah menunjukkan penurunan kegiatan pada areal kelola HKm, utamanya pada kegiatan pemeliharaan tanaman. Sementara Kumbara (2014) mengungkap faktor-faktor penghambat pembangunan HKm di Desa Gunung Silanu yakni tidak berjalannya kelembagaan, rendahnya sumberdaya kelompok tadi, buruknya akses jalan, ketiadaan modal untuk memulai penanaman, rendahnya teknologi yang digunakan, dan konflik dengan pemilik ternak.

pada isu strategis pemberdayaan masyarakat yang meliputi: isu kebijakan, isu sosial ekonomi, isu kelembagaan, isu sumber daya manusia, dan itu sumber daya hutan.

2.3. Analisis Data

Setelah diperoleh data terkait tingkat keberhasilan pemberdayaan masyarakat HKM, selanjutnya dilakukan inventarisasi mengenai faktor-faktor pendorong dan penghambat pengelolaan HKM. Pengolahan data dilakukan dengan metode *Force Field Analysis* (FFA) dan *Analytic Hierarchy Process* (AHP) untuk studi pakar (*expert*). Inventarisasi faktor-faktor pendorong dan penghambat pengelolaan HKM disajikan dalam tabel. Setelah itu, dilakukan identifikasi kekuatan-kekuatan yang paling penting dalam upaya pencapaian tujuan melalui matriks perbandingan berpasangan. Penilaian tersebut diberikan kepada ahli atau pakar (*expert*). Selengkapnya tersaji dalam uraian berikut (Saaty, 1993):

- Membuat matriks perbandingan berpasangan yang penilaiannya dilakukan berdasarkan pilihan atau *judgement* dari pakar dengan menilai tingkat kepentingan satu elemen dibandingkan elemen lainnya. Skala penilaian menggunakan skala Saaty, yaitu 1 – 9.
- Menormalkan data yaitu dengan membagi nilai dari setiap elemen di dalam matriks yang berpasangan dengan nilai total dari setiap kolom.
- Menghitung nilai *eigen vector* dan menguji konsistensinya. Jika tidak konsisten, maka pengambilan data (preferensi) perlu diulangi.
- Mengulang langkah 1, 2 dan 3 untuk seluruh tingkat hierarki.
- Menghitung *eigen vector* dari setiap matriks perbandingan berpasangan.
- Menguji konsistensi hierarki. Jika tidak memenuhi, maka penilaian harus diulang kembali.

Setelah dilakukan uji konsistensi pada setiap pakar dengan metode AHP, selanjutnya dilakukan analisis gabungan seluruh pakar untuk melunturkan subjektivitas dari pakar. Setelah itu, nilai tersebut dikalikan dengan hasil justifikasi peneliti berdasarkan hasil pengamatan di lapangan dengan rentang nilai yang diberikan 1 – 5. Nilai akhir untuk masing-masing kekuatan diperoleh melalui hasil kali antara bobot dan nilai. Metode ini disebut *Force Field Analysis* (FFA) yang digunakan untuk mengetahui faktor pendorong yang paling kuat dan faktor penghambat yang paling lemah. FFA dikembangkan oleh Kurt Lewin (1951) dan secara luas digunakan untuk menginformasikan pengambilan keputusan. Metode ini dianggap kuat untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif dari kekuatan-kekuatan yang berbeda yang bekerja pada isu perubahan organisasi yang potensial, serta digunakan pula untuk menilai sumber dan kekuatan mereka. Hasil yang dicapai dari analisis FFA adalah berupa strategi-strategi (*ways*) yang selanjutnya dibuat rencana aksi (*clear action*) menunjuk pada tindakan yang jelas dan operasional.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Analisis Tingkat Keberhasilan Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan HKM

Berdasarkan tabel kriteria dan indikator pemberdayaan masyarakat serta hasil skoring yang telah dilakukan, maka disimpulkan bahwa pemberdayaan masyarakat HKM di Desa Gunung Silanu berhasil dengan hasil skoring 2,3 atau >2. Variabel yang memiliki nilai tertinggi secara berurutan yaitu pendamping 3.00; kelembagaan 2.80; kesepahaman 2.60; kemitraan 1.80; peningkatan kapasitas sumberdaya manusia 1.60; dan monitoring evaluasi 1.00. Skor akhir dari keseluruhan variabel adalah 2.30, sementara skor ideal yaitu 3.00. Hal ini mengindikasikan bahwa masih terdapat masalah-masalah pemberdayaan masyarakat pada HKM di Desa Gunung Silanu.

Variabel pemberdayaan yang memiliki skor tertinggi yaitu peran dari pendamping. Pendamping kegiatan berasal dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang saat ini berjumlah tiga orang. Selain itu, terdapat pula pendamping diluar LSM, misalnya dari Forum Komunikasi Hutan Kemasyarakatan Tingkat Desa Turatea maupun dari pihak universitas. Pendamping telah berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait dan aktif bersama masyarakat karena intensitas kunjungan ke kelompok tani dilakukan secara intensif. Selain itu,

pendamping mempunyai keahlian dan pengetahuan sesuai kebutuhan sehingga mampu memfasilitasi kelompok tani dalam memasarkan potensi hasil hutan yang dimiliki. Selain pendamping yang sudah baik, kelembagaan masyarakat juga sudah terbentuk. Kelembagaan HKm menjadi salah satu wujud untuk mengorganisir diri masyarakat dalam kelompok yang lebih besar yang diorientasikan bukan hanya untuk mengatur diri sendiri tetapi juga dalam hubungannya dengan lingkungan. Kepengurusan kelompok tani dibagi menjadi empat, yaitu kelompok tani Sumber Bahagia, kelompok tani Minasa Te'ne Pa'mae, kelompok tani Abbulo Sibatang, dan kelompok tani Jihad. Struktur dan uraian tugas kepengurusan juga sudah jelas, mulai dari ketua kelompok, sekretaris, bendahara, serta masing-masing anggota. Kepengurusan kelompok dipilih melalui musyawarah yang didasarkan atas umur, kemampuan, tanggung jawab, dan kemauan kerja. Salah satu hal penting dalam suatu kelembagaan yaitu program kerja. Selain aturan internal dan aturan tertentu yang dibuat setiap kelompok, program kerja kelompok tani di Desa Gunung Silanu juga telah disusun dengan aktivitas yang hampir sama pada setiap kelompok. Rencana kerja ini disebut rencana operasional. yang dimulai pada bulan Juni sampai bulan Desember. Kegiatan dimulai pada bulan Juni karena penanaman telah berjalan pada bulan sebelumnya sehingga kegiatan yang dilakukan merupakan kegiatan lanjutan. Hal penting lainnya yaitu aset organisasi. Aset nyata yang dimiliki oleh kelompok tani adalah pondok kerja (tempat pertemuan), alat pengupas kulit biji jambu mete (kacip), mesin penggiling kunyit, dan aset produktif terpenting berupa Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK), seperti jambu mete, kunyit, kemiri, dan lebah madu. Sementara dampak yang lebih riil dari adanya HKm adalah kondisi tata air yang baik sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan.

Variabel pemberdayaan yang tidak kalah penting adalah kesepahaman. Kesepahaman mengenai fungsi dan manfaat HKm cenderung sudah terjalin dengan baik. Hal tersebut dapat dilihat dengan dilakukannya pertemuan sebanyak satu hingga tiga kali dalam sebulan antara masyarakat sebagai kelompok tani dengan stakeholder terkait. Kelompok tani aktif mengikuti pertemuan dan telah berpartisipasi dalam pelaksanaan HKm. Begitu pun dengan administrasi dan dokumentasi kegiatan kelompok yang terlaksana dengan baik. Setiap anggota kelompok tani memahami jabatan dan fungsinya masing-masing.

Meskipun pendamping, kelembagaan, dan kesepahaman sudah jelas. Namun, masalah lain yang dihadapi yaitu peningkatan kapasitas SDM yang belum maksimal. Pelatihan yang pernah dilakukan yaitu pelatihan administrasi yang hanya diikuti oleh ketua dan anggota kelompok yang dianggap berperan dalam pengurusan administrasi kelompok. Terkait pelatihan pengupasan jambu mete, secara detail belum dilakukan. Padahal, sudah ada 10 buah alat pengupas yang dimiliki oleh salah satu kelompok tani. Alat tersebut merupakan bantuan dari Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (BPSKL) Wilayah Sulawesi. Saat ini alat tersebut hanya menjadi barang inventaris kelompok dan belum dimanfaatkan karena kelompok tani belum bisa mengoperasikannya. Untuk kriteria kemitraan, masyarakat belum memiliki mitra tetap yang siap menampung dan memberi pemecahan masalah. Mitra yang ada hanya sebatas musiman, misalnya pada musim jambu mete.

Kegiatan terakhir dalam suatu pemberdayaan adalah monitoring dan evaluasi untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan program serta mengatasi masalah yang timbul dalam pelaksanaan jika ada. Dalam program ini, belum dilaksanakan monitoring dan evaluasi dari BPSKL Wilayah Sulawesi meskipun pedomannya telah ada. Untuk kelompok tani sendiri, monitoring dilakukan secara insidental tanpa adanya pedoman.

3.2. Analisis Faktor-faktor Pendorong (*Driving Force*) dan Penghambat (*Restraining Force*) Pengelolaan HKm

Setelah diperoleh data terkait tingkat keberhasilan pemberdayaan masyarakat HKm, selanjutnya dilakukan inventarisasi mengenai faktor-faktor pendorong dan penghambat pengelolaan HKm yang didasarkan pada indikator pemberdayaan masyarakat. Indikator pemberdayaan tersebut dijadikan sebagai isu dalam pengelolaan hutan kemasyarakatan. Kemudian, dilakukan identifikasi kekuatan-kekuatan yang paling penting dalam upaya pencapaian tujuan melalui matriks perbandingan berpasangan (*pairwise comparison matrix*)

yang mengacu pada nilai yang diberikan oleh pakar (*expert*). Jumlah pakar yang diambil sebanyak 3 orang yang dianggap memiliki kapasitas dan paham terhadap keberadaan hutan kemasyarakatan.

Setelah hasil penilaian setiap pakar dianalisis, selanjutnya dilakukan analisis gabungan seluruh pakar untuk melunturkan subjektivitas dari pakar. Langkah selanjutnya yang dilakukan setelah analisis gabungan adalah mengalikannya dengan hasil justifikasi peneliti berdasarkan hasil pengamatan di lapangan. Rentang nilai yang diberikan yaitu 1 – 5. Nilai akhir untuk masing-masing kekuatan diperoleh melalui hasil kali antara bobot dan nilai. Bobot yang diperoleh dari hasil analisis seluruh pakar diartikan sebagai besar kekuatan faktor memengaruhi isu, sedangkan nilai yang diperoleh dari justifikasi peneliti diartikan sebagai seberapa penting faktor memengaruhi isu. Selanjutnya disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 1. Hasil Analisis Penilaian Faktor Pendorong

Isu	Faktor Pendorong	Bobot	Nilai	B x N
Kesepahaman	Adanya pertemuan kelompok	0.19	3	0.57
	Adanya sosialisasi kebijakan Permenhut tentang hutan kemasyarakatan	0.10	3	0.30
	Masyarakat memahami fungsi dan manfaat hutan kemasyarakatan	0.50	5	2.50
	Masyarakat memahami aturan atau kebijakan terkait hutan kemasyarakatan	0.21	5	1.05
Kelembagaan	Adanya aturan internal kelompok	0.27	3	0.81
	Adanya komitmen anggota kelompok tani dalam melaksanakan aturan	0.33	5	1.65
	Adanya uraian tugas kepengurusan kelompok	0.24	3	0.72
	Adanya program kerja kelompok tani	0.15	3	0.45
Peran Pendamping	Pendamping kelompok jelas	0.19	3	0.57
	Kunjungan pendamping ke kelompok tani secara intensif	0.18	3	0.54
	Pendamping mempunyai keahlian dan pengetahuan sesuai kebutuhan	0.22	5	1.10
	Pendamping mampu menjadi bagian dari masyarakat	0.22	4	0.88
	Pendamping mampu memfasilitasi kelompok tani dalam memasarkan potensi hasil hutan yang dimiliki	0.19	3	0.57
Peningkatan Kapasitas SDM	Dilakukan sekolah lapang sesuai potensi masing-masing hutan kemasyarakatan	0.29	3	0.87
	Dilakukan studi banding untuk peningkatan pengetahuan anggota kelompok tani	0.28	3	0.84
	Adanya bantuan alat ekonomi produktif dari Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (BPSKL) Sulawesi	0.43	5	2.15
Kemitraan	Adanya kelompok tani yang ingin bermitra	0.07	3	0.21
	Adanya lahan hutan kemasyarakatan yang bisa dimitrakan	0.23	3	0.69
	Peran pendamping sebagai penghubung mitra	0.70	5	3.50

Isu	Faktor Pendorong	Bobot	Nilai	B x N
Monitoring dan Evaluasi	Dokumen program kerja kelompok tani tersedia	0.26	3	0.78
	Adanya pertemuan anggota kelompok tani yang terjadwal setiap bulan	0.16	3	0.48
	Adanya monitoring internal sesama anggota kelompok tani	0.45	5	2.25
	Adanya pedoman money dari Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (BPSKL) Sulawesi	0.13	2	0.26

Sumber: Analisis Data Primer, 2018

Tabel 2. Hasil Analisis Faktor Penghambat

Isu	Faktor Penghambat	Bobot	Nilai	B X N
Kesepahaman	Sebagian anggota kelompok tani belum sepaham tentang kebijakan HKm	0.33	3	1.99
	Keinginan beberapa masyarakat untuk memanen hasil hutan kayu (HHK)	0.26	3	0.78
	Belum terlaksananya nota kesepahaman mengenai ternak masyarakat	0.42	3	1.26
Kelembagaan	Aturan formal internal kelompok tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya oleh beberapa anggota	0.48	5	2.40
	Adanya aturan informal yang dibuat oleh setiap kelompok	0.32	3	0.96
	Tidak dilaksanakannya nota kesepahaman antara pemilik ternak liar dari luar desa dengan pengelola areal HKm	0.20	3	0.60
Peran Pendamping	Koordinasi pendamping dengan mitra untuk pemasaran hasil HKm belum maksimal	0.50	3	1.50
	Kepercayaan terhadap pendamping dalam pemasaran hasil HKm masih rendah	0.50	3	1.50
Peningkatan Kapasitas SDM	Anggota kelompok tani belum memiliki kapasitas mengolah HHBK dari HKm	0.52	5	2.60
	Bantuan alat ekonomi produktif Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (BPSKL) Sulawesi belum dimanfaatkan	0.12	3	0.36
Kemitraan	Anggota kelompok tani belum semuanya diikutkan dalam pelatihan	0.36	3	1.08
	Kelompok tani belum memiliki mitra yang tetap dalam memasarkan hasil HKm	0.58	5	2.90
	Belum tersedia mitra untuk pengolahan hasil HKm	0.28	3	0.84
	Mitra musiman yang ada tidak memberikan kontribusi yang signifikan terhadap kelompok tani	0.13	3	0.39

Isu	Faktor Penghambat	Bobot	Nilai	B X N
Monitoring dan Evaluasi	BPSKL Sulawesi belum melakukan monev	0.21	3	0.63
	Monev internal berjalan secara insidental tanpa adanya pedoman untuk kelompok	0.79	5	3.95

Sumber: Analisis Data Primer, 2018

Berdasarkan data pada Tabel 2 dan 3 menunjukkan bahwa terdapat perbedaan bobot dan nilai pada masing-masing faktor setiap isu. Faktor yang memiliki bobot tertinggi dalam isu berarti mempunyai pengaruh yang besar, begitupun dengan nilai yang dimiliki. Nilai tertinggi berarti sangat penting memengaruhi isu.

Faktor yang memiliki nilai dan bobot tertinggi bisa saja mengintervensi faktor lainnya yang memiliki bobot dan nilai yang rendah dalam isu yang sama. Faktor tersebut bisa diperkuat dan bisa memperlemah faktor penghambat. Sebagai contoh pada isu kesepahaman, terdapat empat faktor pendorong dengan bobot yang berbeda-beda. Secara berurut yaitu pemahaman mengenai fungsi dan manfaat HKm 0.50; pemahaman mengenai aturan atau kebijakan HKm 0.21; pertemuan kelompok 0.19; serta sosialisasi kebijakan 0.10. Dari keempat faktor tersebut, faktor pemahaman mengenai fungsi dan manfaat HKm memiliki bobot tertinggi. Hal ini menunjukkan bahwa faktor tersebut memiliki pengaruh yang besar dalam memengaruhi isu dan dapat mengintervensi faktor lainnya sehingga faktor penghambat dalam isu yang sama bisa diperlemah.

Faktor pendorong tertinggi dalam Tabel 2 yaitu peran pendamping sebagai penghubung mitra (0.70). Hal ini menunjukkan bahwa faktor tersebut memiliki pengaruh yang besar dan sangat penting dalam memengaruhi isu. Pendamping sebagai fasilitator harus bisa membantu mengakses pasar atau menjalin kerja sama dengan kelompok tani lain atau pelaku usaha yang sudah maju untuk bermitra setelah variabel pemberdayaan sebelumnya telah berjalan. Hal ini didukung oleh pendapat Zakaria (2008) yang menyatakan bahwa tahap selanjutnya setelah lembaga berdaya adalah pengembangan jejaring kemitraan bisnis. Kemitraan berarti kerja sama dengan memanfaatkan kelebihan atau kemampuan masing-masing pihak untuk mencapai tujuan bersama. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa pendamping berperan sebagai penghubung antara mitra dengan kelompok tani. Hasil komoditas yang diperoleh kelompok tani dari pengelolaan HKm dipasarkan oleh anggota yang terdiri dari jambu mete, kunyit, kemiri, jahe, dan lengkuas. Selain itu, terdapat pula tanaman hortikultura yang dikelola, yaitu jagung kuning.

Sedangkan untuk faktor penghambat tertinggi dalam Tabel 3 yaitu monitoring evaluasi internal berjalan secara insidental tanpa adanya pedoman untuk kelompok (0.79). Kegiatan yang biasa dilakukan oleh kelompok tani sebelum melakukan pertemuan internal adalah melakukan monitoring dengan sesama anggota dan kelompok yang lain. Namun, monitoring tersebut dilakukan secara insidental atau dilakukan hanya pada kesempatan tertentu saja. Kelompok tani melaporkan perkembangan-perkembangan hasil kerja mereka dengan kelompok lain tanpa pedoman monitoring khusus yang dibuat. Faktor ini mempunyai bobot tertinggi yaitu 0.79 dengan nilai 5. Hal ini dianggap berpengaruh dan sangat penting dalam memengaruhi isu.

3.3. Strategi Pengembangan Hutan Kemasyarakatan (HKm)

Strategi dalam penelitian ini diartikan sebagai suatu cara (ways) untuk memperkuat faktor pendorong dan pada saat yang sama memperlemah/memberikan alternatif untuk mengurangi faktor penghambat. Setelah strategi atau cara (ways) tersebut diperoleh, selanjutnya dirumuskan rencana aksi (*clear action*) yang dapat dilakukan secara riil pada pengembangan hutan kemasyarakatan di Desa Gunung Silanu. Rencana aksi diperoleh melalui hasil dari peningkatan faktor pendorong yang dikaitkan dengan cara yang dilakukan untuk melemahkan faktor penghambat (Sabar, 2011). Adapun keseluruhan strategi dan rencana aksi pengembangan hutan kemasyarakatan di Desa Gunung Silanu disajikan pada Tabel 3:

Tabel 3. Strategi dan Rencana Aksi (*Clear Action*) Pengembangan HKm di Desa Gunung Silanu

No	Issue	Ways To Strengthening the Driving Forces	Ways To Reduce Restraining Force	Clear action
1.	Kesepahaman	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan pemahaman dan pengetahuan KTH terkait kebijakan, fungsi, dan manfaat HKm 	<ul style="list-style-type: none"> Menetapkan areal penggembalaan di dalam wilayah HKm dengan luas tertentu yang tidak menimbulkan kerusakan terhadap lahan-lahan masyarakat Membuat aturan formal terhadap pemilik ternak dan memberikan sanksi jika terjadi pelanggaran 	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan sosialisasi secara berkala mengenai fungsi dan manfaat HKm serta kebijakan dalam pengelolaan HKm Melakukan pelatihan tentang teknik-teknik budidaya pakan ternak melalui pola silvopastura Merumuskan aturan main tentang pemilik ternak dan menerapkan sanksi secara tegas yang telah disepakati secara formal
2.	Kelembagaan	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan penguatan komitmen anggota KTH Melaksanaan kegiatan berdasarkan rencana kerja yang ada 	<ul style="list-style-type: none"> Sinkronisasi aturan formal internal kelompok dan aturan informal kelompok Meningkatkan peran dari organisasi formal yang mengatur tentang masalah kepemilikan ternak 	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan pertemuan khusus guna meningkatkan komitmen anggota KTH Melakukan evaluasi terhadap program kerja yang telah dibuat dengan implementasinya di lapangan Merformulasikan kembali aturan informal kelompok Melakukan sosialisasi ataupun pelatihan terkait masalah ternak yang dilakukan oleh organisasi formal yang telah ditetapkan

No	Issue	Ways To Strengthening the Driving Forces	Ways To Reduce Restraining Force	Clear action
3	Peran Pendamping	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan keahlian dan pengetahuan pendamping, terkhusus pada kemampuan memasarkan potensi hasil HKm • Memperkuat hubungan pendamping dengan masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan peran pendamping dalam pemasaran hasil HKm • Meningkatkan kepercayaan (trust) KTH terhadap pendamping 	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan pelatihan terhadap pendamping • Mencari mitra yang tepat dan tetap untuk memasarkan hasil HKm • Melakukan pertemuan khusus guna menguatkan pemahaman KTH tentang peran dari pendamping HKm
4	Peningkatan apasitas SDM	<ul style="list-style-type: none"> • Memanfaatkan bantuan alat ekonomi produktif yang telah ada dan menambah jumlah alat sesuai kebutuhan masing-masing KTH • Meningkatkan kegiatan sekolah lapang dan studi banding 	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan Kapasitas KTH dalam mengolah HHBK dari HKm • Melakukan pelatihan secara berkala dan menyeluruh terhadap anggota KTH 	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan metode demonstrasi cara untuk menunjukkan cara kerja yang benar, seperti cara mengupas biji jambu mete dan cara menggiling kunyit • Memberikan reward kepada kelompok yang berhasil memanfaatkan bantuan alat yang ada • Mengikutkan perwakilan setiap KTH dalam kegiatan sekolah lapang dan studi banding guna meningkatkan pengetahuan anggota KTH
5	Kemitraan	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan daya saing hasil HKm dengan melakukan sistem pemasaran dan distribusi produk yang jelas dengan 	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan relasi dengan mitra musiman yang ada 	<ul style="list-style-type: none"> • Mengarahkan KTH dalam mencari mitra • Menciptakan sistem pemasaran yang jelas dengan mitra, baik mitra musiman maupun mitra tetap

No	Issue	Ways To Strengthening the Driving Forces	Ways To Reduce Restraining Force	Clear action
		mitra		
6	Monitoring dan Evaluasi	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan kegiatan monev internal bagi KTH dan melaksanakan secara berkala 	<ul style="list-style-type: none"> Pelaksanaan monev oleh BPSKL dan Dinas Kehutanan terprogram secara jelas 	<ul style="list-style-type: none"> Membuat pedoman monitoring evaluasi internal Melakukan monitoring secara berkala untuk memantau pengelolaan HKm, mulai dari preparasi kegiatan, pelaksanaan, hingga evaluasi.

Rencana aksi pada tabel tersebut merupakan hal yang tepat dilakukan pada pengembangan hutan kemasyarakatan (HKm) di Desa Gunung Silanu Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto. Rencana aksi ini dapat menekan faktor penghambat serta meningkatkan faktor pendorong pengelolaan hutan kemasyarakatan.

4. KESIMPULAN

Pemberdayaan masyarakat hutan kemasyarakatan (HKm) di Desa Gunung Silanu berhasil dengan skor 2.3 atau >2. Faktor pendorong (driving forces) pengelolaan hutan kemasyarakatan terdiri atas: pertemuan kelompok, pemahaman fungsi dan manfaat serta kebijakan hutan kemasyarakatan, aturan internal kelompok, keahlian dan pengetahuan pendamping, sekolah lapang dan studi bandung, bantuan alat ekonomi produktif, dan monitoring kelompok. Sedangkan faktor penghambat (restraining force) terdiri atas: ketidaksepahaman mengenai ternak, aturan informal kelompok, koordinasi pendamping dengan mitra yang belum maksimal, ketidakmerataan pelatihan, belum adanya mitra yang tetap, dan belum dilakukannya monitoring dan evaluasi secara berkala.

Strategi untuk pengembangan program pemberdayaan masyarakat hutan kemasyarakatan di Desa Gunung Silanu yaitu: (a) Peningkatan pemahaman dan pengetahuan KTH terkait kebijakan, fungsi, dan manfaat HKm; (b) Penetapan areal penggembalaan di dalam wilayah HKm dengan luas tertentu yang tidak menimbulkan kerusakan terhadap lahan-lahan masyarakat; (c) Pembuatan aturan formal terhadap pemilik ternak dan memberikan sanksi jika terjadi pelanggaran; (d) Penguatan komitmen anggota KTH; (e) Pelaksanaan kegiatan berdasarkan rencana kerja; (f) Menyinkronkan aturan formal internal dan aturan informal kelompok; (g) Peningkatan peran dari organisasi formal yang mengatur masalah ternak; (h) Peningkatan peran pendamping dalam pemasaran hasil HKm; (i) Peningkatan kepercayaan (trust) KTH terhadap pendamping; (j) Pemanfaatan bantuan alat ekonomi produktif dan penambahan jumlah alat sesuai kebutuhan masing-masing KTH; (k) Peningkatan kegiatan sekolah lapang dan studi banding; (l) Peningkatan kapasitas KTH dalam mengolah HHBK; (m) Pelatihan secara berkala dan menyeluruh terhadap anggota KTH; (n) Peningkatan daya saing hasil HKm dengan sistem pemasaran dan distribusi produk yang jelas dengan mitra; (o) Peningkatan kegiatan monev internal bagi KTH dan pelaksanaan secara berkala; (p) Pelaksanaan monev oleh BPSKL Sulawesi dan Dinas Kehutanan terprogram secara jelas.

DAFTAR PUSTAKA

- Baso. 2016. *Pengembangan Partisipasi Petani pada Hutan Kemasyarakatan (HKm) di Kabupaten Jeneponto (Studi Kasus: Desa Marayoka, Kecamatan Bangkala)*. Tesis Program Pascasarjana. Program Studi Agribisnis. Universitas Islam Makassar.
- Fisher, M., Maryudi, A., & Sahide, M. (2017). Forest and Society: Initiating a Southeast Asia Journal for Theoretical, Empirical, and Regional Scholarship. *Forest and Society*, 1(1), 1-7. doi:<http://dx.doi.org/10.24259/fs.v1i1.1369>
- Kementerian Kehutanan. 2007. Lampiran Peraturan Menteri Kehutanan tentang Rencana Makro Pemberdayaan Masyarakat di Dalam dan Sekitar Hutan. 2016. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor:P.83/Menlhk/Setjen/Kum.l/10/2016 tentang Perhutanan Sosial.
- Kementerian Kehutanan. 2016. *Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor:P.83/Menlhk/Setjen/Kum.l/10/2016 tentang Perhutanan Sosial*.
- Kumbara, A.P.R. 2014. *Faktor-faktor Pedukung dan Penghambat Implementasi Kebijakan Hutan Kemasyarakatan di Desa Gunung Silanu Kabupaten Jeneponto*. Fakultas Kehutanan. Universitas Hasanuddin. Makassar.
- Lewin, K. 1951. Force Field Analysis. *Field Theory in Social Science*, New York: Harper and Row (Online), (<http://www.midtools.com/forcefld.html>. Diakses 11 Juni 2018).
- Moeliono, M., Thuy, P., Waty Bong, I., Wong, G., & Brockhaus, M. (2017). Social Forestry - why and for whom? A comparison of policies in Vietnam and Indonesia. *Forest and Society*, 1(2), 78-97. doi:<http://dx.doi.org/10.24259/fs.v1i2.2484>
- Saaty, T. L. 1993, Decision making with the analytic hierarchy process. *International Journal of Services Sciences*. Int. J. Services Sciences, Vol. 1, No. 1, 2008.
- Sabar, A; Supratman; dan M. Junus. 2011. Strategi Optimasi Kolaborasi Pengelolaan Zona Khusus Taman Nasional (Studi Kasus Taman Nasional Babul Maros, Sulawesi Selatan).
- Sutajab, M.A. 2015. *Tindakan Kelompok Tani dalam Konflik Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan di Desa Gunung Silanu, Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto*. Fakultas Kehutanan. Universitas Hasanuddin. Makassar.